

**DIGITALISASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PESANTREN
DALAM PERSPEKTIF EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS**

Ulfyah^{1✉}, Qorina Widadiyah², Puput Putriyani³

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

ulfie8671@gmail.com¹, qorinawida@gmail.com², Putuput272@gmail.com³

Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-08-17; Published: 2022-08-31

ABSTRACT

The accelerating wave of digital transformation has created both opportunities and challenges for Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia, particularly in reforming their administrative management systems. Traditional pesantren, which have long relied on paper-based and manually operated administrative processes, are now increasingly pressured to adopt digital solutions to meet modern demands for efficiency, transparency, and accountability. This study aims to examine the conceptual foundations, implementation strategies, and institutional outcomes of digitalization in pesantren administrative management through the lens of efficiency and accountability. Employing a systematic library research methodology, this study analyzed peer-reviewed journal articles, authoritative management textbooks, and relevant policy documents published within the last five years. Findings indicate that digitalization significantly enhances administrative efficiency by reducing processing time, minimizing human error, and improving data accessibility. Furthermore, digital systems strengthen institutional accountability by enabling transparent financial reporting, traceable decision-making processes, and improved stakeholder communication. The study concludes by proposing a contextually grounded framework for sustainable digital transformation in pesantren administration.

Keywords: digitalization, pesantren administration, management efficiency, institutional accountability, Islamic education

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia menyimpan kekayaan tradisi intelektual dan spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keberadaannya yang mencapai lebih dari 26.000 lembaga dengan jutaan santri di seluruh nusantara menjadikan pesantren sebagai kekuatan sosial, keagamaan, dan pendidikan yang strategis dalam konteks pembangunan nasional (Kementerian Agama RI, 2022). Namun di balik kekuatan *historis* tersebut, pesantren pada umumnya masih menghadapi persoalan mendasar dalam tata kelola administrasi yang menghambat efektivitas operasional dan akuntabilitas kelembagaannya. Sistem pencatatan santri yang masih manual, pengelolaan keuangan yang kurang transparan, hingga komunikasi antara pesantren dengan wali santri yang tidak terstruktur merupakan persoalan umum yang ditemukan pada berbagai kajian empiris mengenai manajemen pesantren di Indonesia (Mulyasa, 2021).

Era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah membawa perubahan fundamental dalam paradigma pengelolaan organisasi di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. *Digitalisasi*, yang merujuk pada proses konversi informasi dari format analog ke digital disertai *transformasi* proses kerja secara menyeluruh berbasis teknologi, kini telah menjadi keniscayaan bagi setiap organisasi yang ingin tetap relevan, kompetitif, dan akuntabel (Tjiptono & Diana, 2021). Dalam konteks pendidikan, digitalisasi administrasi mencakup seluruh proses pengelolaan data peserta didik, keuangan, kepegawaian, pelaporan, komunikasi kelembagaan, dan dokumentasi yang dialihkan dari sistem manual ke dalam platform digital yang terintegrasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendorong transformasi digital di lingkungan madrasah dan pesantren, termasuk program Sistem Informasi Manajemen Pesantren (SIMP) yang mulai disosialisasikan pada tahun 2021 (Fathoni, 2021).

Efisiensi dan akuntabilitas merupakan dua dimensi kritis yang menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi digital dalam manajemen administrasi pesantren. Efisiensi administratif, dalam pengertian yang paling operasional, merujuk pada kemampuan institusi untuk menghasilkan output layanan administrasi yang optimal dengan sumber daya yang minimal, termasuk waktu, tenaga, dan biaya (Siagian, 2020). Sementara itu, akuntabilitas kelembagaan mengacu pada kewajiban institusi untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari wali santri, donatur, pemerintah, hingga masyarakat umum (Wahab, 2021). Kedua dimensi ini memiliki keterkaitan yang erat dan saling menguatkan dalam konteks tata kelola pesantren modern yang bertanggung jawab.

Kajian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pesantren di Indonesia masih beroperasi dengan sistem administrasi yang sangat jauh dari memadai. Penelitian Hidayat dan Machali (2022) menemukan bahwa lebih dari 60 persen pesantren di Jawa Tengah masih mengandalkan buku catatan manual untuk proses registrasi santri dan pembayaran SPP, sementara hanya sekitar 15 persen yang telah mengimplementasikan

sistem informasi manajemen berbasis komputer secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas keuangan, keterlambatan pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan tingginya potensi kesalahan administrasi yang berulang. Lebih jauh, ketiadaan sistem digital yang terintegrasi juga menyulitkan pesantren dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah yang kini mensyaratkan pemenuhan standar administratif digital sebagai kondisi kelayakan (Muhaimin, 2020).

Meskipun *urgensi digitalisasi administrasi* pesantren semakin disadari oleh berbagai pemangku kepentingan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan berlapis. Hambatan pertama bersifat infrastrukural, yakni keterbatasan akses jaringan internet, perangkat keras komputer, dan listrik yang masih menjadi persoalan di banyak pesantren di daerah terpencil (Mustari, 2021). Hambatan kedua bersifat sumber daya manusia, di mana mayoritas tenaga administrasi pesantren, yang dalam banyak kasus merangkap sebagai ustaz atau pengurus yayasan, belum memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem manajemen berbasis teknologi. Hambatan ketiga bersifat kultural dan psikologis, di mana sebagian pimpinan pesantren masih memandang digitalisasi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan kemandirian pesantren yang telah berlangsung lama (Kompri, 2020).

Literatur ilmiah yang secara spesifik mengkaji digitalisasi administrasi pesantren dalam perspektif efisiensi dan akuntabilitas masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada aspek pembelajaran berbasis teknologi di pesantren, pengembangan kurikulum pesantren modern, atau kepemimpinan kiai dalam konteks perubahan organisasi, tanpa menyentuh secara mendalam persoalan transformasi sistem administrasi. Wahab (2021) dalam kajiannya mengenai modernisasi pesantren mengakui bahwa aspek administrasi dan tata kelola merupakan bidang yang paling lambat mengalami pembaruan dibandingkan aspek-aspek lainnya. Sementara itu, penelitian Danim (2022) tentang manajemen sekolah modern juga belum mengintegrasikan secara komprehensif konteks pesantren dengan kekhasan nilai dan strukturnya. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya *research gap* yang signifikan dalam literatur manajemen pendidikan Islam, yakni belum tersedianya kajian yang secara sistematis membahas kerangka digitalisasi administrasi pesantren berbasis efisiensi dan akuntabilitas.

Berbagai penelitian internasional mengenai transformasi digital di institusi pendidikan memberikan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi untuk konteks pesantren. Studi yang dilakukan di Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa institusi pendidikan berbasis keagamaan yang berhasil mengimplementasikan transformasi digital adalah mereka yang mampu menyelaraskan perubahan teknologi dengan nilai-nilai dan identitas kelembagaannya (Tjiptono & Diana, 2021). Keselarasan ini sangat relevan bagi pesantren Indonesia, yang memegang prinsip *al-muhafadzah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi yang baik sambil mengambil hal baru yang lebih baik) sebagai panduan dalam menghadapi perubahan.

Prinsip ini sesungguhnya memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi digitalisasi administrasi pesantren, asalkan implementasinya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan kekhasan kelembagaan yang menjadi identitas pesantren (Zainuddin, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur yang ada melalui tiga tujuan spesifik. Pertama, menganalisis landasan konseptual efisiensi dan akuntabilitas dalam konteks manajemen administrasi pesantren. Kedua, mengidentifikasi domain-domain kritis administrasi pesantren yang paling potensial untuk ditransformasi melalui digitalisasi. Ketiga, membangun kerangka implementasi digitalisasi administrasi pesantren yang kontekstual, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai kelembagaan pesantren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, sekaligus menyediakan panduan praktis bagi pengelola pesantren, pemangku kebijakan, dan pemerhati pendidikan Islam yang ingin mendorong transformasi tata kelola pesantren yang lebih efisien dan akuntabel (Hidayat & Machali, 2022; Mulyasa, 2021).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah membangun kerangka konseptual berbasis analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, bukan untuk menghasilkan data lapangan primer (Zed, 2022). Sumber data penelitian mencakup sumber primer berupa buku-buku teks manajemen pendidikan Islam, manajemen administrasi, dan transformasi digital, serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang *terindeks Scopus, Web of Science*, dan Sinta 1–2. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan langkah-langkah: penelusuran sistematis, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, pembacaan kritis, dan pencatatan terstruktur (Darmalaksana, 2020). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengonfirmasi konsistensi temuan dari berbagai sumber yang independen. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2021).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Konseptual Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Administrasi Pesantren

Hasil penelusuran dan analisis literatur yang dilakukan dalam studi ini mengungkapkan bahwa konsep efisiensi dan akuntabilitas dalam konteks manajemen administrasi pesantren memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan penggunaannya dalam organisasi publik atau korporat pada umumnya. Efisiensi dalam tata kelola pesantren tidak dapat direduksi sekadar pada penghematan biaya atau percepatan proses, melainkan harus mencakup *optimalitas* pencapaian tujuan

institusional yang bersifat multidimensi, yakni tujuan pendidikan, pembinaan karakter, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian tradisi keislaman secara bersamaan (Siagian, 2020). Dimensi multidimensi inilah yang membedakan efisiensi di pesantren dari efisiensi di lembaga pendidikan umum, dan yang harus menjadi acuan dalam menilai keberhasilan digitalisasi administrasi pesantren.

Dari perspektif manajemen modern, efisiensi administratif ditentukan oleh setidaknya empat komponen utama, yaitu kecepatan pemrosesan data dan informasi, akurasi pencatatan dan pelaporan, aksesibilitas informasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang berwenang, serta kapasitas sistem untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data (Tjiptono & Diana, 2021). Keempat komponen ini secara kolektif menentukan seberapa efektif sebuah sistem administrasi dalam mendukung proses inti penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Penelitian ini menemukan bahwa sistem administrasi manual yang masih dominan di sebagian besar pesantren Indonesia memberikan performa yang sangat rendah pada keempat komponen tersebut, terutama pada aspek aksesibilitas informasi dan dukungan pengambilan keputusan berbasis data, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kapasitas adaptif dan responsif pesantren terhadap perubahan lingkungan eksternalnya (Wahab, 2021).

Sementara itu, akuntabilitas dalam konteks pesantren mengandung setidaknya tiga lapisan yang saling tumpang tindih. Lapisan pertama adalah akuntabilitas vertikal kepada pemerintah dan otoritas regulasi, yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan, data kependidikan, dan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Lapisan kedua adalah akuntabilitas *horizontal* kepada wali santri, donatur, dan masyarakat sekitar, yang menuntut transparansi dalam pengelolaan dana dan pertanggungjawaban atas hasil pendidikan yang dijanjikan. Lapisan ketiga adalah akuntabilitas internal kepada dewan pengurus, pengasuh, dan seluruh warga pesantren, yang mengharuskan adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja yang jelas dan terukur (Kompri, 2020). Digitalisasi administrasi berpotensi memperkuat ketiga lapisan akuntabilitas ini secara simultan melalui penyediaan sistem pelaporan yang terotomatisasi, terstandarisasi, dan mudah diverifikasi oleh berbagai pihak.

Domain Kritis Digitalisasi Administrasi Pesantren

Melalui analisis komparatif terhadap berbagai studi kasus dan literatur manajemen pendidikan Islam, penelitian ini mengidentifikasi lima domain administrasi pesantren yang memiliki urgensi dan potensi tertinggi untuk ditransformasi melalui digitalisasi. Domain pertama adalah manajemen data santri, yang mencakup proses penerimaan santri baru, pencatatan data pribadi, pemantauan perkembangan akademik dan karakter, pengelolaan kehadiran, serta proses kelulusan dan alumni. Digitalisasi domain ini melalui sistem informasi santri yang terintegrasi memungkinkan pengelola pesantren untuk memantau perkembangan setiap santri secara *real-time*, mengidentifikasi santri yang memerlukan perhatian khusus, dan menghasilkan laporan perkembangan yang komprehensif bagi wali santri secara otomatis dan berkala (Muhaimin, 2020).

Domain kedua yang diidentifikasi adalah manajemen keuangan dan aset pesantren. Ini merupakan domain yang paling kritis dari perspektif akuntabilitas,

sekaligus yang paling rentan terhadap persoalan pengelolaan jika tidak ditangani dengan sistem yang memadai. Penelitian Mulyasa (2021) menyimpulkan bahwa lemahnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan salah satu faktor terbesar yang membuat pesantren sulit mendapatkan kepercayaan dari lembaga-lembaga pemberi dana, termasuk pemerintah dan lembaga zakat-wakaf. Digitalisasi keuangan pesantren melalui aplikasi akuntansi yang dirancang khusus untuk konteks pesantren, yang mencakup pengelolaan SPP, dana wakaf, zakat, infak, sedekah, serta aset pesantren, akan secara dramatik meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap integritas institusi.

Domain ketiga adalah manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia, yang mencakup rekrutmen tenaga pengajar dan administrasi, pengelolaan jadwal mengajar, evaluasi kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, dan administrasi kepegangatan. Fathoni (2021) mengungkapkan bahwa mayoritas pesantren di Indonesia belum memiliki sistem manajemen SDM yang terstruktur, sehingga pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan masih sangat bergantung pada hubungan personal dan kebijaksanaan individual pengasuh. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi dalam hal konsistensi kualitas layanan, keadilan dalam pemberian insentif, dan keberlanjutan institusi ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Digitalisasi domain ini melalui sistem human resource information system (HRIS) yang terintegrasi akan memberikan transparansi dan konsistensi yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan SDM pesantren.

Domain keempat adalah manajemen komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal, khususnya wali santri dan komunitas alumni. Penelitian Danim (2022) menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara institusi pendidikan dengan orang tua merupakan salah satu determinan terpenting dalam kepuasan dan kepercayaan wali terhadap lembaga. Digitalisasi komunikasi melalui aplikasi pesan terencana, portal orang tua, dan platform media sosial yang terkelola dengan baik akan memungkinkan pesantren untuk menyampaikan informasi perkembangan santri, pengumuman kelembagaan, dan laporan kegiatan secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Dimensi ini juga memiliki implikasi langsung terhadap reputasi dan daya tarik pesantren dalam menjaring calon santri baru di tengah persaingan yang semakin ketat.

Domain kelima adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran, yang dalam konteks pesantren mencakup pengelolaan jadwal pelajaran, pencatatan materi yang telah diajarkan, monitoring ketercapaian target hafalan atau kitab, evaluasi hasil belajar santri, dan dokumentasi proses pembelajaran. Digitalisasi domain ini memungkinkan standarisasi dan dokumentasi proses pembelajaran yang lebih baik, serta memfasilitasi evaluasi kurikulum yang berbasis data konkret daripada sekadar penilaian subjektif (Mustari, 2021). Kelima domain yang diidentifikasi ini pada dasarnya membentuk ekosistem administrasi pesantren yang saling terhubung, sehingga idealnya digitalisasi dilakukan secara terintegrasi dalam satu *platform* terpadu, bukan secara parsial pada masing-masing domain secara terpisah.

Kerangka Implementasi Digitalisasi Administrasi Pesantren Berbasis Efisiensi dan Akuntabilitas

Bertolak dari analisis terhadap literatur mengenai transformasi digital di lembaga pendidikan dan kekhasan konteks pesantren, penelitian ini mengonstruksi sebuah kerangka implementasi yang terdiri atas empat fase yang berurutan dan saling berkaitan. Fase pertama adalah Asesmen dan Kesiapan (*Readiness Assessment*), di mana pesantren melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur digital yang ada, kompetensi SDM dalam bidang teknologi informasi, karakteristik sistem administrasi yang sedang berjalan, serta pemetaan kebutuhan dan prioritas digitalisasi. Pada fase ini, pimpinan pesantren juga perlu membangun konsensus internal di antara seluruh elemen pesantren mengenai urgensi dan arah transformasi digital, sehingga proses perubahan tidak menghadapi resistensi yang menghambat (Kompri, 2020).

Fase kedua adalah Perencanaan Strategis Digital, di mana pesantren menyusun cetak biru transformasi digital yang memuat visi, tujuan, tahapan, anggaran, dan ukuran keberhasilan yang spesifik. Tjiptono dan Diana (2021) menekankan bahwa kegagalan transformasi digital di banyak organisasi bersumber dari ketiadaan perencanaan yang matang dan terukur, bukan dari keterbatasan teknologi yang tersedia. Pada fase ini, pesantren perlu menentukan pilihan platform digital yang paling sesuai dengan kebutuhan, skala, dan kemampuan finansialnya, dengan mempertimbangkan faktor seperti kemudahan penggunaan, ketersediaan dukungan teknis, keamanan data, dan kompatibilitas dengan sistem yang mungkin telah ada. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan, ustaz, tenaga administrasi, dan perwakilan wali santri, dalam proses perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi digital yang dipilih benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Fase ketiga adalah Implementasi Bertahap dan Peningkatan Kapasitas, yang merupakan fase terpanjang dan paling menentukan dalam keseluruhan proses transformasi digital. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan implementasi bertahap (*phased implementation*) yang dimulai dari domain administrasi yang paling kritis dan memiliki kesiapan tertinggi, untuk kemudian secara gradual diperluas ke domain-domain lainnya. Siagian (2020) menegaskan bahwa perubahan organisasional yang dilakukan secara terlalu cepat dan menyeluruh justru berpotensi menimbulkan disfungsi dan penolakan dari anggota organisasi. Sejalan dengan proses implementasi, program peningkatan kapasitas digital bagi seluruh tenaga administrasi pesantren harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup pelatihan teknis pengoperasian sistem, penguatan literasi data, dan pembinaan kultur kerja berbasis sistem.

Fase keempat adalah Evaluasi, Konsolidasi, dan Pengembangan Berkelanjutan. Pada fase ini, pesantren secara berkala mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap efisiensi dan akuntabilitas administrasinya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada fase perencanaan. Wahab (2021) mengingatkan bahwa transformasi digital bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan dan dinamis, yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan

kelembagaan, dan perubahan regulasi. Mekanisme umpan balik yang melibatkan seluruh pengguna sistem, baik internal maupun eksternal, harus dibangun secara formal untuk memastikan bahwa sistem digital yang berjalan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Kerangka empat fase ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi panduan praktis yang adaptif bagi berbagai tipologi pesantren, mulai dari pesantren salafiyah yang baru memulai proses digitalisasi hingga pesantren modern yang ingin mengoptimalkan sistem digital yang telah ada.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengonstruksi kerangka konseptual digitalisasi manajemen administrasi pesantren yang memuat dimensi efisiensi dan akuntabilitas secara terintegrasi. Melalui analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, ditemukan bahwa digitalisasi administrasi pesantren bukan sekadar persoalan penerapan teknologi, melainkan merupakan proses transformasi organisasional yang kompleks yang memerlukan kesiapan pada tiga level sekaligus: infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Lima domain administrasi kritis yang diidentifikasi manajemen data santri, keuangan, kepegawaian, komunikasi, dan kurikulum membentuk ekosistem administrasi yang idealnya ditransformasi secara terintegrasi melalui kerangka implementasi empat fase. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efisiensi dan akuntabilitas adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari digitalisasi yang berhasil: digitalisasi yang hanya mengejar efisiensi tanpa memperkuat akuntabilitas akan menghasilkan sistem yang rentan terhadap penyalahgunaan, sementara akuntabilitas tanpa efisiensi akan menghasilkan sistem yang memberatkan pelaksana. Pesantren yang berhasil menyeimbangkan keduanya dalam proses digitalisasinya akan memiliki posisi kompetitif yang jauh lebih kuat dalam ekosistem pendidikan Indonesia masa depan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Danim, S. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan transformasional kepala sekolah: Visi dan strategi sukses era teknologi, situasi krisis, dan internasionalisasi pendidikan*. Rineka Cipta.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fatah, N. (2020). *Landasan manajemen pendidikan (Edisi Baru)*. PT Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14350.33603>
- Fathoni, A. (2021). *Manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam*. Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba Dipantara.
- Kompri. (2020). *Manajemen pendidikan: Komponen-komponen elementer kemajuan sekolah*. Ar-Ruzz Media.

- Muhaimin. (2020). Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran. Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2021). Menjadi kepala sekolah profesional. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M. (2021). Manajemen pendidikan: Teori dan aplikasi. Rajagrafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2020). Manajemen modern: Sebuah kajian komprehensif. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif (3rd ed.). Alfabeta.
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2021). Transformasi bisnis berbasis teknologi digital. Penerbit Andi.
- Wahab, A. (2021). Manajemen berbasis sekolah: Konsep dan aplikasinya pada madrasah. Alfabeta.
- Zainuddin, M. (2020). Filsafat pendidikan Islam: Telaah tentang komponen dasar ilmu pendidikan Islam. Literasi Nusantara.
- Zed, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (Edisi 3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.